

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Attamimi A.Hamid S. 1992. “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Busro H. Abubakar dan Abu Daud Busroh, 1983. *Asas-Asa Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Center Of Religius And Cross-Cultural Studis (CRCS) UGM. 2013. “*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2012*”.
- Fauzi ALi, Ihsan. dkk. 2011. “*Kotroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*”. Hasil studi Kerjasama antara Yayasan Waqaf Paramadina dengan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM.
- Hadjon M. Philipus M. 1994. “*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya.
- Hakim Abdul Aziz. 2012. *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 8.
- HR Ridwan 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ibrahim Harmmailly dan Moh.Kusnardi. 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat studi HTN UI dan Sinar Bakti.
- Ibrahim Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta. 2011. *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Kelsen Hans. 1961. *General Theory of law and State*. Translatedby: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell).
- Koentjaraningrat.1997. *Sejarah Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta

- Kusdarini Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, B. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lembaga Survei Indonesia dan TAF. 2010. *Survey Nasional tentang Toleransi Agama*
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan, Bagir, et al 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nurmayani. 2009 . *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung .
- Paulson L. Stanley. 1992. “On Kelsen’s Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen,” *Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Trasnslation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992)
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2009, “*Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Kerukunan Umat Beragama*” Edisi Kesebelas.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers.

- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- The Wahid Institute. 2008. “*Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008 Pluralisme Beragama/Berkeyakinan: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*”. The Wahid Institute dan Yayasan TIFA.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang.
- Setara Institute (Halili dan Bonar Tigor Naipospos). 2015. *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia tahun 2014*”, Pustaka Masyarakat Setara.
- Setara Institute. 2017. “*Laporan Tahunan Setara Institute Kebebasan Beragama /berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia*.”
- SF Marbun et. al. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Azhari Muhammad Subhi,” *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*”. Jurnal HAM • Vol. 11 • Tahun 2014
- Kholikin Ahsanul, “*Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomo 9 Dan 8 Tahun2006 (Kasus Pecabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec. Limo Kota Depok)*”Jurnal Harmoni Vol. IX Nomor 35 Juli-September 2010.
- Mawardi Marmiati, *Kisruh Alih Fungsi Rumah Sebagai Rumah Ibadat*, Jurnal SmaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi Volume 02 No. 01 Juli 2016.

Sulaiman, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati, Jawa Tengah." Analisa Journal of Social Science and Religion Volume 22 No. 02 December 2015.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 30, LN No. 165, TLN No. 3886, Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia.*

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, LN RI No. 3, TLN RI No. 2726. *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 1996" *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama*".

Keputusan Menteri Agama Nomor 378 Tahun 2003, *Tentang Sumber-Sumber Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama*

### **Internet**

Terkait *PTUN IMB Gereja Katholik Paroki Santo Joseph, APKK: Tunggu dan Hormati Proses Hukum*, <https://haluankepri.com/2020/01/22/terkait-ptun-imb-gereja-katolik-paroki-santo-joseph-apkk-tunggu-dan-hormati-proses-hukum/diakses,22-01-2020>.

Terkait *Sejarah Berdirinya Gereja Bethel Indonesia*, <http://www.sinodegbi.org/organisasi/tentang-kami.html?start=2>, diakses 20-04-2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Banyumas

Wawancara dengan Kepala Sekretariat GBI Stadion Mini Purwokerto

Wawancara dengan Staf Administrasi DPMPPTSP Kabupaten Banyumas